

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amilia Chasabah Astari, Dkk, 2015. *Penyelesaian Sengketa Kepegawaian*. Gema.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Dian Aries Mujiburohman, 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Enny Agustina, 2019. *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Haposan Siallagan, Dkk, 2019. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Lembaga Pemberdayaan.
- M. Nasruhi, 2020. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Pasuruan: Universitas Merdeka Pasuruan.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchsan 2000, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ridwan, 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan HR, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Riawan Tjandra, 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Rosyid Al Atok, 2016. *Negara Hukum Indonesia*. Malang: Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang.
- Rozalli Abdullah, 1992. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, 2011. *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Produk-produk Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Victor Yaved Neno, 2006. *Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Citra Widya Bakti.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: SinarGrafika

Zairin Harahap, 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi, Cetakan ke-9. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/TUN/1992 tentang syarat finalitas sebagai kualifikasi objek sengketa TUN

Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Organ Pengelola Universitas Andalas

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Antarorgan

C. Jurnal

- Ahmad, Viorizza S. P dan Mohammad Hidayat M, (2024). *Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Konstitusi Vol 21, hlm. 393.
- Ali, F. F. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 9(8).
- Amilia Chasabah astari, dkk, (2015) "Penyelesaian Sengketa Kepegawaian", Gema
- Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 208-226.
- Jiwantara, F. A. (2019). Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. *Jatiswara*, 34(2), 131-142.
- Maria Paulina, Dkk, (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. Diponegoro Law Journal Vol 12, Nomor 2.
- Mochamad Muslich Haji Sodiq, (2021). "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 12 Nomor 1, hlm. 60-68
- Panjaitan, B. (2015). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(2), 1-17.
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541-557.

D. Skripsi

- Dece Ridlo Kurnia, 2017, *Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan terhadap Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor 03/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY)*, Universitas Jenderal Sudirman.
- Sutini, Lia, 2019, *Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja*, Universitas Airlangga.